

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Power adalah instrumen utama dalam studi Hubungan Internasional. Mengutip kata-kata Mearsheimer, “*What money is to economics, power is to international relations*” (Mearsheimer, 2001). Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian mengenai niat negara lain, negara-negara dengan cepat memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas kelangsungan hidup mereka sendiri, dan cara terbaik untuk memastikan kelangsungan hidup itu adalah dengan menjadi negara yang paling kuat dalam sistem tersebut (Mearsheimer, 2001). Gagasan ini berkontribusi pada penggambaran *pursuit of power* sebagai suatu siklus usaha yang terus-menerus, di mana negara-negara tanpa henti berusaha memaksimalkan *power* relatif terhadap negara lain untuk meningkatkan keamanan dan memajukan kepentingan mereka. Dengan begitu, keputusan kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh pertimbangan *power*.

Power didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk membentuk politik dunia sesuai dengan kepentingannya (Beckley, 2018). Morgenthau menekankan bahwa kepentingan nasional, yang didefinisikan dalam hal *power*, merupakan landasan dari strategi kebijakan luar negeri (Morgenthau, 1948). Menurutnya, politik internasional merupakan arena bagi negara-negara untuk mempertahankan dan meningkatkan *power* negara sendiri dan untuk mengendalikan atau mengurangi *power* negara lain (Morgenthau, 1948). Berkaitan dengan hal tersebut, *power* menjadi alat penting sekaligus tujuan yang tak terelakkan, yang membentuk prioritas setiap aktor negara.

Era setelah Perang Dingin, yang ditandai dengan percepatan globalisasi yang signifikan, menyaksikan pertumbuhan hubungan internasional dan pendalaman berbagai dimensi yang berperan dalam *power politics*. Menurut Nye, dalam dunia dengan *power* yang tersebar luas dan permasalahan yang ada rumit dan

saling terkait, kekuatan ekonomi muncul sebagai elemen krusial dalam memengaruhi politik global (Nye, 2011). Sederhananya, bidang politik dan ekonomi menjadi semakin tumpang tindih. Hal ini menandakan perluasan dalam cara negara dapat menggunakan pengaruhnya, mengakibatkan peningkatan kompleksitas dalam *power struggle* yang didorong oleh kepentingan nasional.

Seiring dengan meningkatnya keterlibatan unsur ekonomi dalam politik global, globalisasi telah mendorong perkembangan kerja sama internasional, di mana negara-negara tidak jarang menggunakan organisasi antarpemerintah (IGO) untuk meningkatkan pengaruh mereka dan mencapai tujuan strategis. Lebih jauh, Nye menyatakan bahwa negara dapat meningkatkan *power* mereka dengan terlibat dalam organisasi internasional, di mana mereka dapat membentuk norma dan memengaruhi perilaku negara lain (Nye, 2004). Meskipun kerja sama semakin meningkat, *pursuit of power* terus membuat konflik tak terelakkan, karena negara-negara saling berbenturan dalam upaya mereka untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh (Waltz, 1979). Pada akhirnya, dorongan mendasar untuk mempertahankan diri dan mendominasi terus membentuk hubungan internasional, memotivasi negara-negara untuk mengembangkan kemandirian dalam mengejar kepentingan.

Dalam mengejar kepentingan nasional, negara menggunakan *statecraft*—didefinisikan sebagai seni menjalankan urusan negara—melalui empat teknik utama: propaganda, diplomasi, militer, dan ekonomi. Seperti yang telah disebutkan, perkembangan globalisasi telah menyebabkan meningkatnya penggunaan alat-alat ekonomi dalam kebijakan luar negeri. Sejalan dengan itu, teknik ekonomi menjadi semakin umum dipilih entitas politik karena efektivitas biaya dan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan tindakan militer (Baldwin, 1985). Salah satu instrumen tersebut adalah pemberian sanksi ekonomi.

Sanksi ekonomi adalah suatu bentuk pemaksaan non-militer di mana tindakan ekonomi digunakan untuk mencapai tujuan politik dengan memberikan kesulitan (Economides & Wilson, 2001). Meskipun sanksi ekonomi dipahami sebagai pengganti kekerasan, sanksi tetap bersifat koersif dan merupakan bentuk

kenegaraan yang bergerak menuju paksaan, di mana melampaui persuasi. Dengan kata lain, sanksi ekonomi adalah pemaksaan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku negara sasaran dengan menimbulkan kesulitan melalui tindakan ekonomi yang diterapkan, sehingga memaksa negara tersebut untuk mengubah kebijakan sesuai dengan kepentingan politik negara pengirim (Drezner, 1999). Sanksi ekonomi memanfaatkan kekuatan negara untuk mengendalikan sumber daya keuangan dan pasar demi kepentingan nasional. Meskipun aktor non-negara berperan dalam urusan ekonomi, pemerintah nasional tetap memegang peranan utama: menetapkan aturan dan memengaruhi hasil ekonomi. (Gilpin, 2001).

Meskipun taktik ekonomi telah menjadi semakin populer dalam strategi kebijakan luar negeri, penggunaan kekuatan militer dalam mengejar kepentingan nasional tetap tidak dapat ditinggalkan. Militer merupakan taktik tata negara yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai *power struggle*. Sepanjang sejarah, negara-negara mengandalkan kekuatan militer untuk menegaskan dominasi, mempertahankan kedaulatan, dan mencapai tujuan-tujuan strategis lainnya. Kecenderungan ini berasal dari kekuatan militer yang sangat mendesak dan berdampak nyata, yang secara langsung menyentuh masalah keamanan, di mana merupakan isu paling sensitif dan vital bagi negara.

Ketika negara merasa keamanannya terancam, menyerahkan kemampuan militer bukanlah suatu pilihan. Hal ini ditunjukkan oleh konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Rusia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan militer ketika merasa terancam oleh perluasan NATO. Seperti yang dikatakan Mearsheimer, perluasan NATO adalah akar penyebab masalah, bukan agresi Rusia (Mearsheimer, 2014). Benih-benih konflik antara Rusia dan Ukraina dapat ditelusuri dari upaya perluasan NATO, yang telah ditentang keras oleh Rusia sejak pertengahan 1990-an. Ukraina menjadi perhatian khusus mengingat Armada Laut Hitam Rusia, satu-satunya pelabuhan Rusia di perairan yang menghubungkan Rusia dengan Mediterania, terletak di sekitar negara tersebut, menjadikannya wilayah yang strategis bagi keamanan Rusia. Di luar langkah-langkah defensif,

konflik di Ukraina juga menjadi wadah bagi Rusia untuk menegaskan kemampuan mereka dalam memproyeksikan *power*. Melalui intervensi militer, Rusia bertujuan untuk memengaruhi lanskap politik di Ukraina dan mengirim pesan kepada komunitas internasional tentang tekad untuk membela kepentingannya.

Terlepas dari keberlanjutan ketegangan antara Rusia dan Ukraina, hubungan kedua negara tersebut tidak lagi menjadi fokus utama penelitian ini, melainkan telah beralih ke tanggapan dan keterlibatan negara-negara Barat (kemudian menjadi negara-negara G7) dengan Rusia sehubungan dengan konflik yang tengah berlangsung. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa keterlibatan Barat merupakan faktor kunci dalam kelanjutan konflik antara Rusia dan Ukraina, sehingga tanggapan mereka terhadap tindakan Rusia, yang dimaksudkan untuk mengekang upaya perluasan NATO, juga strategi Rusia dalam menghadapi tanggapan tersebut, menjadi penting untuk dieksplorasi.

Negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia sebagai respons atas kebijakannya terhadap Ukraina. Sanksi tidak hanya bertujuan untuk mengejar kepentingan dengan menekan Rusia dan menunjukkan solidaritas kepada Ukraina tanpa menggunakan tindakan militer langsung (Connolly, 2018), tetapi juga untuk menegaskan dominasi sebagai kelompok negara ekonomi terkemuka. Uni Eropa dan AS memulai sanksi pada Maret 2014, yang menargetkan individu yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran keuangan di Ukraina. Tindakan-tindakan ini mencakup pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pembatasan transaksi keuangan, khususnya di Krimea dan Sevastopol (Council Decision 2014/119/CFSP 2014; The White House Office of the Press Secretary 2014b). Setelah insiden MH-17, sanksi diperluas hingga mencakup larangan perdagangan senjata, ekspor dengan aplikasi militer, dan dukungan keuangan kepada perusahaan-perusahaan Rusia, yang berdampak pada lembaga-lembaga keuangan besar seperti Savings Bank, VTB, Gazprombank, dan lainnya (Korhonen, 2019).

Seiring dengan berkembangnya rezim sanksi Barat, pemerintah Rusia tidak tinggal diam. Sebagai tanggapan, Rusia merumuskan langkah-langkah ekonominya

sendiri untuk menangkal dampak sanksi. Ini melibatkan tiga strategi utama: sekuritisasi sektor ekonomi utama, mempromosikan substitusi impor, dan menumbuhkan hubungan ekonomi di luar Barat, terutama di Asia (Connolly, 2018). Ketiga elemen tersebut terlihat dalam rezim sanksi balasan Rusia (*counter-sanctions regime*), yang diberlakukan pada bulan Agustus 2014.

Sekuritisasi mbingkai isu-isu ekonomi sebagai masalah keamanan nasional (Bacon et al., 2006), yang disorot dalam Strategi Keamanan Nasional Rusia tahun 2015; memprioritaskan kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Pergeseran ini menghasilkan kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan mendiversifikasi hubungan ekonomi luar negeri. Pembentukan Komisi Pemerintah tentang Substitusi Impor pada tahun 2015, yang didukung oleh sumber daya keuangan yang signifikan, difokuskan pada dukungan terhadap sektor-sektor utama yang terkena dampak sanksi. Ini termasuk langkah-langkah seperti pinjaman preferensial dan keringanan pajak untuk merangsang produksi dalam negeri. Bersamaan dengan itu, Rusia mengintensifkan upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan mitra non-Barat, khususnya Tiongkok, sebagaimana diuraikan dalam dokumen strategi pasca-2014. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kedaulatan ekonomi dengan melibatkan berbagai mitra global, mengurangi risiko gangguan eksternal sembari memposisikan Rusia sebagai pemain terkemuka dalam ekonomi global (Connolly, 2018).

Meskipun dengan upaya-upaya untuk meminimalisir dampak sanksi, kinerja ekonomi Rusia tetap tidak dapat terhindar dari pelemahan; sanksi menyebabkan penurunan PDB sebesar 1,2%–1,5% pada tahun 2014-2017 karena berkurangnya investasi asing langsung (FDI) (Pestova & Mamonov, 2019; Barseghyan, 2019). IMF memperkirakan penurunan pertumbuhan tahunan sebesar 0,2 poin persentase karena sanksi dari tahun 2014 hingga 2018, dengan harga minyak yang rendah memiliki dampak yang lebih besar. Namun, hal ini tidak mematahkan tekad Rusia dalam mengejar kepentingannya. Terlepas dari dampak sanksi terhadap kinerja perekonomian negara, Rusia melanjutkan tindakan

militernya di Ukraina, meningkatkan konflik dengan invasi besar-besaran pada tanggal 24 Februari 2022.

Mengikuti eskalasi konflik, kompleksitas sanksi ekonomi yang dikenakan kepada Rusia pun meningkat. Tidak hanya kompleksitas sanksi, tetapi penegakan tindakan ini juga semakin intensif sejak penerapan awal oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang mana menyatukan negara-negara anggota G7, kelompok yang didominasi oleh anggota NATO, dalam pendekatan bersama. Pembaruan sanksi pada tahun 2022 ini mengurangi visibilitas perbedaan signifikan dalam desain penerapan, sehingga menciptakan penerapan sanksi yang lebih seragam. Perbedaan dalam desain yang dimaksud adalah variasi dalam pemilihan individu dan entitas yang dikenai sanksi sesuai penilaian negara, pertimbangan dampak target, dan hubungan ekonomi praktis dengan Rusia. Misalnya, Igor Sechin, Sergei Ivanov, dan Vladimir Yakunin dikenai sanksi oleh AS, Kanada, dan Australia tetapi tidak oleh UE. Gazprom menjadi sasaran AS tetapi tidak oleh UE. Jepang memberlakukan pembekuan aset, larangan perjalanan, dan embargo senjata tetapi menghindari sanksi terhadap sektor energi Rusia (Connolly, 2018).

Penyesuaian target yang mengikuti kepentingan nasional ini, dengan satu atau lain cara, tersamarkan melalui kebijakan tambahan untuk membatasi harga minyak asal Rusia. G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Italia, Inggris, Prancis, Jepang, Kanada, dan Jerman, bersama dengan Australia sebagai anggota Price Cap Coalition, mencapai konsensus mengenai harga maksimum \$60 per barel untuk minyak mentah Rusia yang diangkut melalui laut pada tanggal 2 Desember 2022, sejalan dengan keputusan bulat oleh negara-negara Anggota Uni Eropa (Federal Foreign Office, 2022). G7 memberlakukan batasan harga tertinggi pada produk minyak bumi, berlaku pada tanggal 5 Februari 2023, dengan menetapkan harga masing-masing sebesar \$45 dan \$100 untuk produk olahan berkualitas rendah dan tinggi. Penekanan pada harga minyak sebagai titik fokus strategis mencerminkan pelajaran yang diambil dari pemberlakuan sanksi awal, di mana, pengaruh harga minyak memiliki dampak yang jauh lebih besar pada prospek ekonomi Rusia, mengingat Rusia merupakan salah satu negara eksportir minyak terbesar di dunia.

Ketergantungan Rusia yang besar pada ekspor energi, yang merupakan 45% dari anggaran nasionalnya, menjadikan hal ini sebagai senjata ekonomi tersendiri bagi Barat (IEA, 2022).

Dampak gabungan dari pembatasan harga minyak dan sanksi lainnya diperkirakan akan membatasi tindakan militer Rusia dan mengurangi motivasi serta kemampuannya untuk menyerang negara-negara tetangga. Tiga dampak utama yang diprediksi adalah: berkurangnya pendapatan devisa yang menantang stabilitas nilai tukar Rusia, kendala kas harian untuk pengadaan senjata asing, dan pendapatan pemerintah masa depan yang lebih rendah yang membatasi kapasitas untuk mendanai dan melancarkan perang (Johnson et al., 2023).

Sanksi pembatasan harga berlaku untuk setiap pembelian minyak mentah yang diekspor dari Rusia melalui laut, selama pembelian tersebut melibatkan layanan maritim, keuangan, atau layanan lain dari entitas mana pun yang berbasis di yurisdiksi anggota koalisi. Produk minyak bumi akan dikenakan batasan dengan implementasi yang setara, sesuai dengan harga yang telah ditentukan (Reuters, 2022). Desain sanksi ini memanfaatkan dua aspek utama ekspor minyak Rusia (Johnson et al., 2023): sebagian besar minyak Rusia diekspor melalui laut, dan Barat, khususnya melalui layanan asuransi laut, memfasilitasi ekspor ini sebelum invasi. Dengan mendominasi pasar asuransi laut, negara-negara Barat menekan eksportir Rusia, sejalan dengan data yang menunjukkan sekitar 90% kapal ekspor minyak Rusia diasuransikan oleh perusahaan-perusahaan di Britania Raya, Uni Eropa, atau negara-negara G7 sebelum Februari 2022 (VoxEU, 2023).

Gambar 1.1 Kapal Minyak Rusia yang Menggunakan Layanan Asuransasi UK

Russian oil traded using ships insured in the United Kingdom

Billion EUR Russian oil traded using ships insured in UK | Total by insurer | March 2022-November 2023



Source: CREA analysis using Kpler, Eurostat, Equasis, P&I providers. •

Insurance data not available before July 2022. We assume provider on July 2022 was always the provider before.

*North and Standard merged to become NorthStandard on February 20, 2023; either insurer after this date is assumed to be NorthStandard.



Sumber: CREA, 2024.

Transportasi laut merupakan tulang punggung perdagangan dan perekonomian global, dan merupakan pilihan yang paling efisien untuk mengirim barang, khususnya minyak, karena kapal dapat membawa banyak bahan bakar, dan dengan demikian biaya per barel untuk memindahkan minyak ini sangat murah (UN, 2016). Selain itu, ekspor minyak mentah melalui pipa secara efektif mencapai kapasitas, sehingga Rusia tidak dapat beralih dari penggunaan kapal untuk mengekspor melalui laut. Meski unggul dalam harga dan efektivitas, pengoperasian kapal laut memiliki risiko kerugian yang sering kali melebihi nilai kapal tersebut, sehingga umumnya membutuhkan asuransi kelautan.

Asuransi kelautan menanggung risiko properti dan kewajiban, termasuk asuransi kapal, kargo, dan kewajiban pihak ketiga. Asuransi ini juga mencakup risiko energi lepas pantai, seperti produksi gas alam dan minyak di anjungan pengeboran, dan kewajiban atas kerusakan lingkungan. Pemilik kapal menerima pertanggungjawaban "lambung kapal dan mesin", sementara pemilik kargo mendapatkan asuransi kargo (Novikova et al., 2022). Untuk risiko yang lebih luas, klub P&I (Protection and Indemnity) menanggung kewajiban yang dihindari oleh perusahaan asuransi tradisional, termasuk risiko pihak ketiga seperti kerusakan kargo, risiko perang, dan bahaya lingkungan seperti tumpahan minyak dan polusi.

Satu-satunya komunitas yang menyediakan asuransi terhadap risiko terbuka, International Group of Protection and Indemnity Clubs (IGP&I) Clubs, memiliki 13 anggota yang mencakup 90% armada dunia yang sebagian besar menggunakan pasar reasuransi Eropa dan negara G7 lainnya. Rendahnya porsi kepemilikan dan/atau asuransi kapal di luar G7 menunjukkan bahwa Rusia sejauh ini kurang berhasil dalam menemukan penyedia layanan pelayaran dan asuransi alternatif. Hal ini menggambarkan betapa kuatnya seperangkat alat yang dimiliki oleh Koalisi Batasan Harga untuk menekan pendapatan minyak Rusia dengan menurunkan batasan harga, jika hal ini dipantau dan ditegakkan dengan benar.

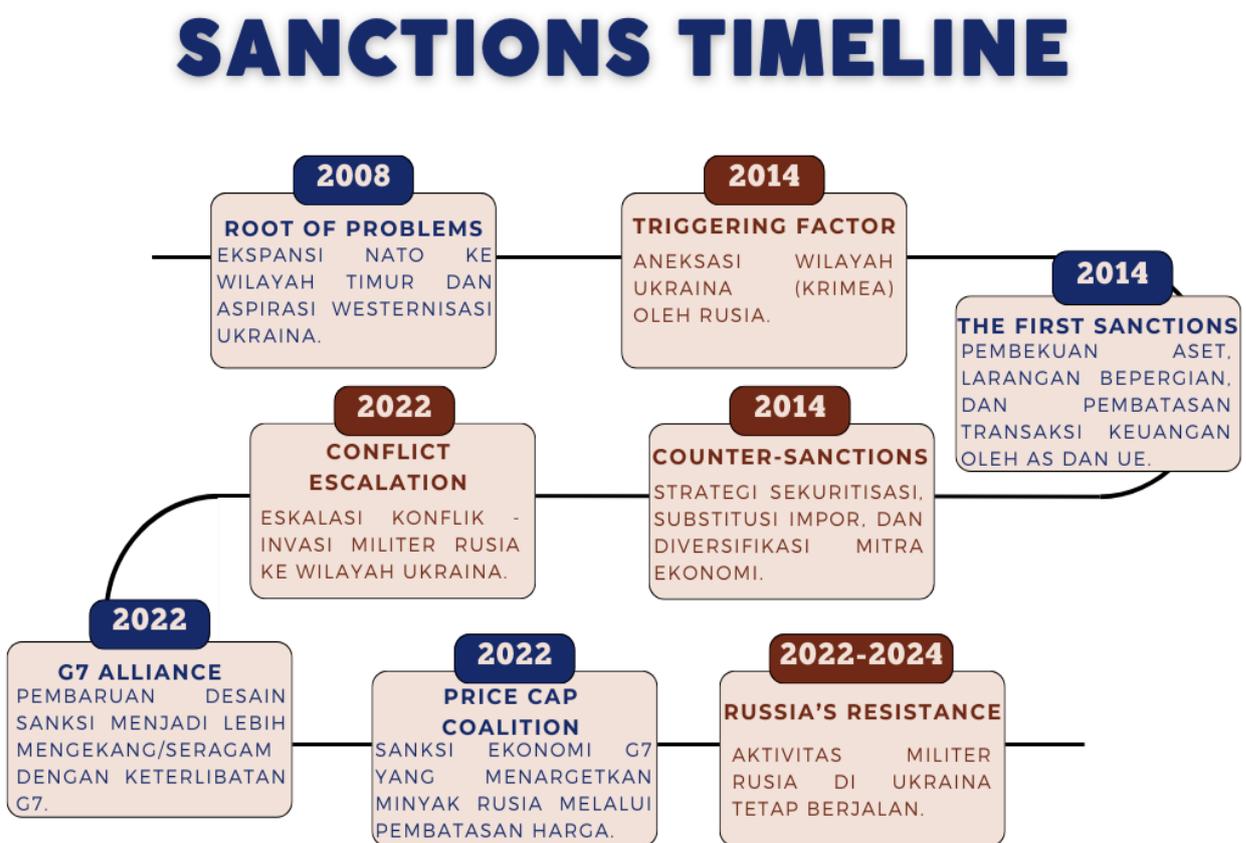
Selain tekanan sanksi batasan harga dari G7, lanskap geografis Rusia menghadirkan serangkaian tantangan unik karena cakupan lapisan es yang cukup besar, yang menyelimuti sekitar 65% wilayahnya yang luas, melimitasi akses negara terhadap lautan terbuka. Akibatnya, selain karena faktor harga, Rusia masih sangat bergantung pada jalur laut, ketergantungan yang menempatkan Rusia pada posisi di mana jalur maritim, khususnya yang dikuasai oleh negara-negara Barat, menjadi sangat penting bagi konektivitas ekonomi Rusia.

Dengan pangkalan angkatan laut utama di Laut Hitam dan wilayah sekitar Sankt Peterburg, sulit bagi Rusia untuk tidak melewati wilayah anggota koalisi dalam berdagang, sehingga memaksa Rusia untuk menggunakan layanan asuransi mereka. Menurut data yang ada, Rusia masih bergantung pada perusahaan asuransi Barat untuk menanggung lebih dari separuh armada kapal tanker yang mengekspor minyaknya pada tahun 2023 (Bloomberg News, 2023). Hal ini tentu berdampak pada harga minyak Rusia yang terjual. Sejak penerapan sanksi batasan harga, pendapatan Rusia yang terkait dengan minyak telah turun sebesar 49% dibandingkan periode Maret hingga November 2022 dan 23% dibandingkan periode Januari 2021 hingga Januari 2022 (Johnson et al., 2023).

Meskipun tekanan sanksi dan tantangan alam berkolaborasi dalam memberikan kesulitan, kinerja ekonomi Rusia, jika dibandingkan dengan dampak sanksi awal pada beberapa tahun pertama setelah penerapannya, justru terus mengalami kenaikan jika dilihat dari PDB tahunan. Hal ini menimbulkan keraguan

tentang efektivitas sanksi dan menunjukkan potensi keberhasilan rezim sanksi balasan. Efektivitas sanksi perlu ditelusuri lebih lanjut, namun, kegagalan konstan sanksi yang diterapkan oleh negara-negara G7 secara sekilas tercerminkan dalam ketidakmampuannya untuk memengaruhi kebijakan Rusia di Ukraina, bahkan dengan desain baru yang lebih mengekang. Untuk tinjauan singkat tentang efektivitas sanksi yang dipertanyakan, lihat *Timeline* berikut:

Gambar 1.2 *Timeline* Kronologi Sanksi Ekonomi terhadap Rusia



Dinamika antara G7 dan Rusia menggarisbawahi apa yang Drezner kenali sebagai *sanctions paradox*. Ini didasarkan pada antisipasi konflik masing-masing pihak yang sudah berakar dari sejarah konflik panjang mereka. Analisis Drezner memperlihatkan bagaimana sanksi ekonomi, meskipun diterapkan secara luas dalam hubungan internasional, sering kali gagal mencapai tujuan yang diharapkan (Drezner, 1999). Langkah-langkah yang dimaksudkan untuk memaksa kepatuhan dan melemahkan, justru sering kali menjadi bumerang. Alih-alih menyerah pada

tekanan G7 yang didominasi oleh negara-negara Barat dengan sejarah konflik panjang dengan Rusia, Rusia memperkuat tekad dan menumbuhkan kemampuan domestik sehingga sanksi secara tidak sengaja memperkuat rezim Rusia dan pembangkangannya, mengurangi pengaruh negara-negara G7 dan mengabadikan siklus permusuhan.

Sifat paradoks sanksi menuntut kajian yang lebih mendalam mengenai dinamika konflik antara G7 dan Rusia, sebagaimana dampaknya melampaui hasil langsung dari konsesi sasaran. Sanksi dimaksudkan untuk memproyeksikan *power* dan memaksa kepatuhan, tetapi sering kali mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan dengan mengurangi pengaruh negara yang memaksakan. Paradoks ini terletak pada bagaimana penggunaan tekanan ekonomi terhadap “musuh” dapat memperkuat tekad sasaran, mendorong aliansi alternatif, dan menginspirasi ketahanan domestik terhadap paksaan eksternal (Drezner, 1999). Akibatnya, pengaruh negara yang memaksakan mungkin terkikis, karena sasaran beradaptasi dan mencari jalur baru untuk mengurangi dampak sanksi sambil memperjuangkan kepentingan nasional, yang didefinisikan dalam hal *power*. Memahami dinamika yang kompleks ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas sebenarnya dan implikasi jangka panjang sanksi dalam politik global.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah disebutkan, penelitian ini akan mengkaji reaksi timbal balik antara Rusia dan negara-negara yang tergabung dalam G7 terhadap strategi kebijakan luar negeri masing-masing terkait konflik di Ukraina, dengan penekanan khusus pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sanksi ekonomi. Dengan menyandingkan wawasan para pendahulu dengan tanggapan nyata Rusia dan negara-negara G7, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas dan kontradiksi yang melekat pada penggunaan sanksi sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dalam situasi konflik seperti fenomena yang telah dipaparkan, yang terangkum dalam judul “**Strategi Kebijakan Luar Negeri Rusia Melawan Sanksi Ekonomi G7 Ditinjau dari *Sanctions Paradox***”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Bagaimana strategi Rusia terhadap sanksi ekonomi G7 menciptakan *sanctions paradox*?”**

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian dibatasi pada kajian Ekonomi Politik Internasional yang berputar pada pembahasan mengenai sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Rusia terkait aktivitas militernya di Ukraina. Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara G7 yang menargetkan penjualan minyak Rusia sejak tahun 2022 akan menjadi kajian utama, dengan keseluruhan sanksi oleh Barat sejak pemberlakuan awal pada tahun 2014 sebagai materi pendukung. Penelitian ini akan berfokus pada eksplorasi dan analisis penerapan sanksi tersebut dan dampaknya terhadap Rusia, negara sasaran, melalui sudut pandang *sanctions paradox*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai reaksi timbal balik Rusia dan negara-negara G7 terhadap strategi kebijakan luar negeri masing-masing dalam menanggapi konflik di Ukraina melalui sanksi ekonomi, serta mengidentifikasi berbagai aspek terlibat dalam interaksi aktor-aktor tersebut yang selaras dengan *sanctions paradox*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam mengembangkan pengetahuan Hubungan Internasional khususnya di bidang Ekonomi Politik Internasional.
2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sanksi ekonomi di suatu negara serta menjadi kajian lebih lanjut.